

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN
TERHADAP PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi dan Memenuhi Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada

Program Studi Ekonomi Pembangunan



Nama : Evan Rinaldy Simanullang

NPM : 13051800 39

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

2017

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TERHADAP PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA UMSU, Skripsi 2017

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pembangunan sektor pariwisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Humbang Hasundutan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif tentang pengembangan pembangunan sektor pariwisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Humbang Hasundutan. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan pada sektor pariwisata guna peningkatan daya saing pariwisata terkhususnya Wisata Danau Toba dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sebagai bahan informasi pendukung untuk melakukan penelitian sejenis secara lebih mendalam dan luas ruang lingkupnya.

Sejalan dengan tujuan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, bahwa pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami keterlambatan dalam waktu Tahun 2017.

Berdasarkan analisis dari penelitian maka pembangunan sektor pariwisata menunjukkan keterlambatan dan belum memiliki kontribusi kepada daerah diakibatkan karena minimnya anggaran kepada sektor pariwisata dan keterbatasan pemerintah kabupaten dalam mengembangkan pembangunan sektor pariwisata.

Kata Kunci : Sektor Pariwisata, Kebijakan Pembangunan, Danau Toba, Destinasi Wisata Nasional

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum, wr.wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT serta sholawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang berteknologi canggih seperti saat ini. Yang pada akhirnya peneliti mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul :

“ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TERHADAP PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA”

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi, namun demikian dengan ketulusan hati dari berbagai pihak yang banyak membantu memberi bimbingan, spirit moril dan bantuan, baik jasa, saran, pendapat, informasi, sangat-sangat memberi arti pada penulisan ini. Selanjutnya dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Orang tua dan adik-adikku tercinta serta saudara-saudaraku yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Periode 2009-2017.
5. Ibu Dr. Prawidya Hariani, M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dra. Hj. Roswita Hafni, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dra. Hj. Lailan Safina Hasibuan, M.Si selaku Pembimbing pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Dosen Pengajar Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Drs. Marganti Manullang selaku Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 2005-2015.
10. Bapak Idris Sihite selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Periode 2009-2014.
11. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Indonesia Raya Provinsi Sumatera Utara.
12. Segenap staff dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
13. Teman-teman Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
14. Kawan-kawan dan adik-adik Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Periode 2015-2016 dan periode saat ini, selalu menjadikan HMJ sebagai

lembaga yang menjadi jembatan untuk menjadikan karakter yang intelektual dan akademis dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Republik Indonesia.

15. Kawan-kawan dan adik-adik Partai Mahasiswa Bersatu (PMB) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, selalu menjaga silaturahmi dan selalu memberikan motivasi-motivasi positif baik kepada partai maupun kepada sesama mahasiswa dan selalu menjunjung tinggi tri guna dharma perguruan tinggi.
16. Teman-teman di “PERKAWANAN” dan teman lainnya, Immanuel Sianturi, Ibnu Sina, Hasan Al-qadari, Winner Silaban, Irza D. Cahyadi, Mhd. Rizki Juliansyah, Sofyan, Rizki Aulia Hsb, Tri Suci Ramadhani, yang selalu memberikan semangat secara moril dalam penyelesaian skripsi ini.
17. Semua pihak yang telah memberikan bantuan informasi berharga dan tenaga, sehingga bisa selesai tepat pada waktunya.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu saran, pendapat, koreksi yang positif dan membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Wassalam, wr.wb

Medan, Oktober 2017

Penulis

EVAN RINALDY SIMANULLANG

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan dan Rumusan Masalah	11
1. Batasan Masalah	11
2. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pembangunan Ekonomi	13
1. Pendapatan Nasional	13
a. Pendapatan Nasional Berlaku dan Harga Tetap	14
b. Pendapatan Nasional Harga Pasar dan Harga Faktor	14
c. Pendapatan Nasional Bruto dan Neto	14

2.	Metode Pengeluaran	15
a.	Konsumsi Rumah Tangga	16
b.	Pengeluaran Pemerintah	16
c.	Pembentukan Modal Tetap Sektor Swasta	17
d.	Ekspor Neto	17
3.	Pertumbuhan Ekonomi	18
a.	Teori Pertumbuhan Klasik	18
b.	Teori Pertumbuhan Neo Klasik	19
B.	Pariwisata	19
1.	Pengertian Pariwisata	19
2.	Permintaan dan Penawaran Pariwisata	20
a.	Permintaan Pariwisata	20
b.	Penawaran Pariwisata	21
3.	Pariwisata Sebagai Industri	24
4.	Sarana dan Prasarana Kepariwisata	25
5.	Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah	28
6.	Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Pariwisata	30
7.	Kerangka Konseptual	32
BAB III METODE PENELITIAN		34
A.	Pendekatan Penelitian	34
B.	Definisi Operasional Variabel	34
C.	Tempat dan Waktu Penelitian	35

1. Tempat Penelitian	35
2. Waktu Penelitian	35
D. Populasi dan Sampel	35
1. Populasi	35
2. Sampel	35
E. Jenis dan Sumber Data	36
1. Jenis Data	36
2. Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	39
B. Deskripsi Data	40
1. Obyek Wisata Kawasan Danau Toba	43
2. Sarana dan Prasarana Kepariwisata	47
C. Kebijakan Pemerintah Kabupaten terhadap Pembangunan Pariwisata ..	49
D. Analisis Penelitian	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	Kabupaten yang memiliki kedudukan wilayah administrasi dalam pengembangan wisata Danau Toba	8
TABEL 2.1	Pemencaran Pengeluaran Wisatawan	27
TABEL 4.1	Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Humbang Hasundutan ...	40
TABEL 4.2	Obyek Wisata di Kabupaten Humbang Hasundutan pada setiap kecamatan	41
TABEL 4.3	Pendataan sarana pariwisata, data hotel/ penginapan kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2015/2016	48
TABEL 5.1	Panjang jalan menurut kecamatan dan jenis permukaan jalan (km) di Kabupaten Humbang Hasundutan, 2014/2015	55

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4.1 Obyek wisata di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan	44
GAMBAR 4.2 Obyek Wisata di Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia (RI) umumnya disebut indonesia, adalah negara yang terletak di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Ausutralia serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau, dengan populasi lebih dari 263.846.946 jiwa pada tahun 2016. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 220 juta jiwa.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), meski kaya akan sumber daya alam dan manusia, Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam bidang kemiskinan yang sebagian besar disebabkan oleh korupsi yang merajarela menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke-143 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, yang dikeluarkannya pada tahun 2007.

Dalam mengembangkan pertumbuhan dan pembangunan negara dibutuhkan dana yang sudah di anggarankan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). Terdapat beberapa sumber pendanaan pembangunan baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri.

1. Pendapatan pajak, adalah iuran dari masyarakat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa secara langsung.
2. Retribusi, adalah pemberian dari masyarakat kepada pemerintah dimana terdapat hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembiayaan retribusi tersebut.
3. Keuntungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4. Sumber pendanaan dari luar negeri, adalah bantuan atau hibah yang diperoleh dari pinjaman luar negeri dan penanaman modal asing (PMA).

Demi tercapainya cita-cita dan tujuan untuk mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka pemerintah dalam melaksanakan pembangunan seharusnya tidak terbatas pada pembangunan sektor perekonomian semata, namun sektor-sektor lain yang saling terkait juga harus diupayakan pembangunannya. Salah satu sektor yang tergantung pada sektor lain yaitu sektor pariwisata yang sangat tergantung pada stabilitas nasional dan jaminan keamanan, tetapi masih belum terlalu diperhatikan dan digarap secara maksimal.

Sektor pariwisata yang sangat terkait dengan sektor lain, merupakan suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi “tamu” yang datang berkunjung mulai dari jaminan keamanan dan kenyamanan selama berada di wilayah Indonesia. Industri pariwisata diharapkan mampu menunjukkan peranannya pada sektor perekonomian, sosial, budaya, penerimaan devisa, lapangan pekerjaan, serta sebagai wahana mengatasi konflik yang terjadi di negara dengan kemajemukan yang luar biasa seperti Indonesia.

Negara Indonesia memiliki potensi alam, keanekaragaman flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang semuanya merupakan sumber daya modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Modal tersebut harus dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan data statistik, tercatat bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Dampak kepariwisataan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional di tahun 2015 sebesar Rp. 461,36 triliun, 4,23 % dari PDB nasional. Penciptaan PDB di sektor pariwisata terjadi melalui pengeluaran wisatawan mancanegara, dan investasi pada usaha pariwisata yang meliputi: (1) Usaha daya tarik wisata; (2) Usaha kawasan pariwisata; (3) Jasa transportasi wisata; (4) Jasa perjalanan wisata; (5) Jasa makanan dan minuman; (6) Penyedia akomodasi; (7) Penyelenggaraan hiburan dan rekreasi; (8) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran; (9) Jasa informasi wisata; (10) Jasa konsultan pariwisata; (11) Jasa pramuwisata; dan (12) Wisata tirta.

Meskipun demikian, sektor pariwisata sangat rentan terhadap faktor-faktor lingkungan alam, keamanan, dan aspek global lainnya. Contoh kerusakan alam adalah rusaknya terumbu karang hampir disepanjang pantai Indonesia, padahal terumbu karang dan segala kehidupan yang ada didalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki dan tidak ternilai harganya. Sebagai contoh lainnya

perkembangan-perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan politik global mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan pariwisata.

Negara Indonesia pun turut menikmati dampak dari peningkatan pariwisata dunia terutama pada periode 1990-1996, namun badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 hal tersebut merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi masyarakat pariwisata Indonesia untuk melakukan *repositioning* sekaligus *re-vitalization* kegiatan pariwisata Indonesia. Disamping itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Perencanaan Nasional. Menghadapi tantangan dan peluang ini, telah dilakukan pula perubahan peran pemerintah dibidang kebudayaan dan pariwisata yang pada masa lalu berperan sebagai pelaksana pembangunan, saat ini lebih di fokuskan hanya kepada tugas-tugas pemerintahan terutama sebagai fasilitator agar kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh swasta dapat berkembang lebih pesat. Peran fasilitator disini dapat diartikan sebagai menciptakan iklim yang nyaman agar para pelaku kegiatan kebudayaan dan pariwisata dapat berkembang secara efisien dan efektif. Selain itu sub sektor pariwisata diharapkan dapat menggerakkan ekonomi rakyat, karena dianggap sektor yang paling siap dari segi fasilitas, sarana dan prasarana dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Harapan ini dikembangkan dalam suatu strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata yang berbasis kerakyatan atau *community-based tourism development*.

Sebagai industri perdagangan jasa, kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu: perencanaan

(*planning*) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (*development*) fasilitas utama dan pendorong pariwisata, pengeluaran kebijakan (*policy*) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (*regulation*). Selain peran pemerintah sebagai fasilitator ternyata peran masyarakat juga sangat berpengaruh. Dimana masyarakat merupakan sekelompok orang yang berada di suatu wilayah geografi yang sama dan memanfaatkan sumber daya alam lokal yang ada di sekitarnya. Di negara-negara maju dan berkembang, pada umumnya pariwisata dikelola oleh kalangan swasta yang memiliki modal usaha yang besar yang berasal dari luar daerah dan bahkan luar negeri. Sehingga masyarakat lokal yang berada di suatu daerah destinasi atau tujuan pariwisata tidak dapat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata. Ketidakterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata sering menimbulkan opini bahwa masyarakat lokal bukan termasuk *stakeholders* dari pariwisata dan merupakan kelompok yang termarginalisasi dari kesempatan bisnis dalam bidang pariwisata.

Pada dasarnya masyarakat lokal memiliki pengetahuan tentang fenomena alam dan budaya yang ada di sekitarnya. Namun mereka tidak memiliki kemampuan secara finansial dan keahlian yang berkualitas untuk mengelolanya atau terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata yang berbasis alam dan budaya. Sejak beberapa tahun terakhir ini, potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal tersebut dimanfaatkan oleh para pengelola wilayah yang dilindungi (*protected area*) dan pengusaha pariwisata untuk ikut serta dalam menjaga kelestarian alam yang ada didaerahnya. Sehingga diharapkan masyarakat lokal harus terlibat secara aktif dalam pengembangan pariwisata. Pariwisata juga

diharapkan memberikan peluang dan akses kepada masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha pendukung pariwisata seperti; toko kerajinan, toko cinderamata (*souvenir*), warung makan dan lain-lain agar masyarakat lokalnya memperoleh manfaat ekonomi yang lebih banyak dan secara langsung dari wisatawan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya. Tingkat keterlibaan masyarakat dalam pariwisata sangat berbeda dan ini tergantung dari jenis potensi, pengalaman, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh individu atau masyarakat lokal tersebut.

Selain masyarakat dalam menjalankan perannya, industri pariwisata harus menerapkan konsep dan peraturan serta panduan yang berlaku dalam pengembangan pariwisata agar mampu mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang nantinya bermuara pada pemberian manfaat ekonomi bagi industri pariwisata dan masyarakat lokal. Industri-industri pariwisata yang sangat berperan dalam pengembangan pariwisata adalah: biro perjalanan wisata, hotel dan restoran. Selain itu juga didukung oleh industri-industri pendukung pariwisata lainnya.

Kebijaksanaan pembangunan kepariwisataan nasional dan daerah ini diarahkan menjadi andalan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi dan sekaligus dapat berperan dalam menciptakan peluang lapangan dan kesempatan kerja (Gloria: 2002). Pembangunan kepariwisataan merupakan salah satu sektor andalan pembangunan suatu daerah. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk penguasaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Pembangunan sektor kepariwisataan diharapkan

akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat. Berbagai program partisipasi dan bantuan pembangunan kepariwisataan telah dilakukan di beberapa daerah oleh lembaga Internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga ilmiah, lembaga swadaya masyarakat, swasta dan perseorangan guna menunjang pengembangan sektor kepariwisataan di suatu daerah. Sebagai contoh adalah destinasi pengembangan kawasan wisata Danau Toba diproyeksikan sebagai daerah kawasan wisata nasional yang memiliki fasilitas yang memenuhi standarisasi pariwisata nasional.

Danau Toba merupakan sebuah danau alam besar tekto-vulkanik yang menempati kaldera dari sebuah supervulkan. Danau ini memiliki panjang sekitar 100 kilometer, lebar sekitar 30 kilometer, dan kedalaman hingga 505 meter (1.666 kaki), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Di tengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama Pulau Samosir. Dalam kedudukan kawasan Danau Toba, tujuh (7) kabupaten termasuk bagian dari wilayah administrasi dan memiliki potensi-potensi pada sektor pariwisata dan telah dikembangkan oleh setiap pemerintah kabupaten guna menarik minat wisatawan baik secara lokal ataupun mancanegara untuk berkunjung dan menikmati pesona wisata di daerah tersebut.

Tabel 1
Kabupaten yang memiliki kedudukan wilayah administrasi dalam
pengembangan wisata Danau Toba

No	Nama Tempat Wisata	Pemerintah Kabupaten
1	Pulau Samosir	Kabupaten Samosir
2	Gunung Pusuk Buhit	Kabupaten Samosir
3	Kawasan Tuk-Tuk	Kabupaten Samosir
4	Penatapan Parapat	Kabupaten Simalungun
5	Pulau Sibandang	Kabupaten Tapanuli Utara
6	Tongging	Kabupaten Karo
7	Pantai Lumban Silintong	Kabupaten Toba Samosir
8	Air Terjun Binangalom	Kabupaten Toba Samosir
9	Bakkara	Kabupaten Humbang Hasundutan
10	Aek Sipangolu	Kabupaten Humbang Hasundutan
11	Sipinsur	Kabupaten Humbang Hasundutan
12	Taman Simalem	Kabupaten Dairi
13	Tao Silalahi	Kabupaten Dairi

Sumber : Kementerian Pariwisata Indonesia

Tabel diatas menunjukkan kabupaten-kabupaten yang memiliki wilayah administrasi di wilayah Kawasan Danau Toba beserta beberapa obyek wisata yang di prioritaskan kabupaten dalam bersaing di dunia wisata.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya. Maka pemerintah membentuk Badan

Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016.

Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Induk di Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
2. Penyusunan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan di Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
3. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
4. Penyusunan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelola, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
5. Perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba
6. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pusat dan daerah di Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
7. Penetapan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian Kawasan Pariwisata Danau Toba

8. Pelaksanaan tugas lain terkait pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah.

Pembentukan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba diharapkan dapat meningkatkan kepariwisataan nasional serta pembangunannya. Seiring dengan proyek infrastruktur nasional yang sedang dilakukan oleh pemerintah pusat. Seperti, pembangunan Jalan Tol Tebing-Parapat, Pengembangan Bandara Udara Sibisa, Pengembangan Bandara Udara Silangit, dan pembangunan Jalan Lingkar Danau Toba yang diharapkan selesai pada tahun 2019. Serta peningkatan pembangunan akomodasi dan hotel dapat menyusul mengimbangi pembangunan infrastruktur kawasan wisata tersebut.

Kabupaten Humbang Hasundutan, merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah administrasi kawasan Danau Toba, kabupaten yang diresmikan pada 28 Juli 2003 merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara. Kabupaten yang beribukota Dolok Sanggul ini juga memiliki potensi pariwisata. Wisata Alam Sipinsur yang terletak di Kecamatan Paranginan merupakan objek wisata alam yang sudah mendapatkan perhatian, pengembangan, dan pembangunan pemerintah kabupaten. Objek wisata tersebut sudah memberikan *income* kepada pemerintah kabupaten melalui pajak retribusi wisata. Wisata ini juga memanfaatkan keindahan Danau Toba. Namun tidak secara langsung berinteraksi dengan alam Danau Toba. Berbeda dengan wisata di Kecamatan Baktiraja, wisata ini merupakan objek wisata yang dapat langsung berinteraksi dengan alam Danau Toba. Karena berada di pesisiran Danau Toba. Selain wisata alam, wisata Danau Toba ini juga merupakan Wisata Sejarah. Istana

Sisingamangaraja XII, Goa Partapaan Br. Pasaribu, Batu Hundul-Hundulan, Makam dari Batu (Pagar Batu), yang terletak di Desa Bakkara merupakan objek wisata yang terdapat di kecamatan tersebut. Namun, perhatian yang kurang diberikan oleh pihak kabupaten menjadikan wisata ini dikelola pribadi masyarakat setempat. Fasilitas dan infrastruktur masih kurang optimal. Karena minimnya biaya pengelolaan untuk mengembangkan objek wisata tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Kawasan Wisata Danau Toba di Kabupaten Humbang Hasundutan masih mengalami keterlambatan dibandingkan dengan kabupaten lain yang sudah mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupatennya.
2. Pengembangan objek wisata di Kabupaten Humbang Hasundutan masih kurang diperhatikan oleh pemerintah kabupatennya.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Dalam penulisan ini, penulis hanya membahas mengenai pembangunan dan perkembangan sektor kawasan wisata Danau Toba di Kabupaten Humbang Hasundutan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan Masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Humbang Hasundutan

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui potensi alam di Kabupaten Humbang Hasundutan (studi evaluasi sektor pariwisata)
- b. Mengetahui dan mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian dapat digunakan oleh pemerintah daerah/ kabupaten untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan pada sektor pariwisata guna meningkatkan pendapatan daerah (*income*).
- b. Hasil penelitian sebagai bahan informasi pendukung untuk melakukan penelitian sejenis secara lebih mendalam dan luas ruang lingkupnya.
- c. Hasil penelitian dapat di publikasikan guna memberikan perhatian kepada wisatawan dalam memilih tujuan wisata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Ekonomi

Ekonomi adalah sektor yang sangat penting di dalam membangun bangsa dan negara karena dengan ekonomi yang kuat maka negara tersebut akan kuat, baik secara finansial maupun secara moral. Dengan memiliki ekonomi yang baik maka negara tersebut akan menjadi kokoh dari segala intervensi bangsa asing. Berbeda halnya jika sebuah negara memiliki banyak hutang, maka harga dirinya akan mudah dilecehkan oleh negara lain. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di dalam sebuah negara sangat penting dan menjadi prioritas utama bagi setiap negara.

Pembangunan memiliki arti sebagai sebuah proses dimensional yang melibatkan berbagai perubahan besar di dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang terbiasa dan juga lembaga nasional termasuk pula akselerasi atau percepatan pertumbuhan ekonomi, pemberantasan dan pengurangan kemiskinan absolut (Todaro, 2000:4). Sedangkan (Sukirno, 2004:423) mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi yang di ikuti juga oleh perubahan di dalam corak dan struktur kegiatan ekonomi.

1. Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu (Sukirno, 2010:36).

a. Pendapatan Nasional Berlaku dan Harga Tetap

Pendapatan nasional pada harga berlaku adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan sesuatu negara dalam suatu tahun dan dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Pertumbuhan sesuatu perekonomian diukur dari pertambahan yang sebenarnya dalam barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain. Nilai pendapatan nasional yang didapat dalam penghitungan secara ini dinamakan pendapatan nasional pada harga tetap atau pendapatan nasional riil.

b. Pendapatan Nasional Harga Pasar dan Harga Faktor

Barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian dapat dinilai dengan cara, dengan menggunakan harga pasar dan dengan menggunakan harga faktor. Sesuatu barang dikatakan dinilai menurut harga pasar apabila perhitungan nilai barang itu menggunakan harga yang dibayar oleh pembeli. Hubungan di antara harga pasar dan harga faktor dapat dinyatakan secara persamaan di bawah ini:

$$\boxed{\text{Harga Pasar} = \text{Harga Faktor} + \text{Pajak tak Langsung} + \text{Subsidi}}$$

c. Pendapatan Nasional Bruto dan Neto

Dalam setiap harga pasar sesuatu barang termasuk nilai penyusutan (depresiasi). Industri-industri akan menggunakan barang-barang modal (mesin, peralatan produksi, bangunan dan perabot kantor) untuk menghasilkan barang-barang industri. Nilai barang-barang modal tersebut akan semakin susut dari satu

periode ke periode lain. Kesusutan nilai tersebut merupakan bagian dari biaya produksi, dan oleh sebab itu dalam setiap harga penjualan sesuatu barang termasuk nilai depresiasi barang modal. Pendapatan nasional yang masih meliputi depresiasi dinamakan Produk Nasional Bruto. Untuk memperoleh Produk Nasional Neto, nilai depresiasi harus dikurangi dari Produk Nasional Bruto. Dengan demikian: Produk Nasional Neto adalah Produk Nasional Bruto kurang Depresiasi.

2. Metode Pengeluaran

Data pendapatan nasional yang dihitung dengan cara pengeluaran akan dapat memberi gambaran tentang:

- Sampai di mana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi atau sampai di mana baiknya tingkat pertumbuhan yang dicapai dan tingkat kemakmuran yang sedang dinikmati, dan
- Memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam analisis makro ekonomi.

Menurut pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam kurun waktu satu tahun. Pengeluaran yang dihitung bukan berasal dari nilai transaksi barang jadi, untuk menghindari perhitungan ganda. Empat (4) sektor rumah tangga sebagai pelaku ekonomi yang digunakan sebagai acuan dalam menghitung pengeluaran sebagai berikut.

$$Y = C + I + G + (X + M)$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Nasional

C = Konsumsi

I = Investasi

G = Pengeluaran Pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

a. Konsumsi Rumah Tangga

Nilai perbelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhan dalam satu tahun tertentu dinamakan pengeluaran konsumsi rumah tangga atau dalam analisis makro ekonomi lebih lazim disebut sebagai konsumsi rumah tangga. Pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk membeli makanan, membeli pakaian, membiayai jasa pengangkutan, membayar pendidikan anak, membayar sewa rumah dan membeli kendaraan. Barang-barang tersebut dibeli rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya dan perbelanjaan tersebut dinamakan konsumsi, yaitu barang dan jasa untuk memuaskan keinginan memiliki dan menggunakan barang tersebut.

b. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk menyediakan polisi dan tentara, pembayaran gaji untuk

pegawai pemerintah dan pembelanjaan untuk mengembangkan infrastruktur dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Pembelian pemerintah barang dan jasa dapat digolongkan kepada dua golongan yang utama: Konsumsi Pemerintah dan Investasi Pemerintah.

c. Pembentukan Modal Tetap Sektor Swasta

Pembentukan modal tetap sektor swasta atau lebih sering dinyatakan sebagai investasi, pada hakikatnya berarti pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat menaikkan produksi barang dan jasa di masa akan datang. Membangun gedung perkantoran, mendirikan bangunan industri, membeli alat-alat memproduksi adalah beberapa bentuk pengeluaran yang tergolong sebagai investasi. Pengeluaran untuk investasi ini dilakukan bukan untuk dikonsumsi, tetapi untuk digunakan dalam kegiatan memproduksi di waktu akan datang. Dalam pengumpulan data mengenai investasi, pengeluaran tersebut dibedakan kepada tiga jenis perbelanjaan berikut:

- Pengeluaran ke atas barang modal dan peralatan produksi
- Perubahan-perubahan dalam nilai inventori pada akhir tahun
- Pengeluaran-pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal

d. Ekspor Neto

Nilai ekspor yang dilakukan sesuatu negara dalam suatu tahun tertentu dikurangi dengan nilai impor dalam periode yang sama dinamakan ekspor neto. Ekspor sesuatu negara, seluruh atau sebagian dari nilainya, merupakan barang dan

jasa yang dihasilkan didalam negeri. Oleh sebab itu nilainya harus dihitung ke dalam pendapatan nasional. Barang impor merupakan produksi dari negara lain; oleh sebab itu sebenarnya tidak perlu dihitung ke dalam pendapatan nasional.

3. Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: Jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat ekonomi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kepada teori pertumbuhan klasik yang baru diterangkan, dikemukakan suatu teori yang menjelaskan perkaitan di antara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori pendudukan optimum yang dapat diartikan sebagai pertambahan penduduk akan menyebabkan pada suatu jumlah penduduk yang tertentu produksi marjinal telah sama dengan pendapatan per kapita. Pada keadaan ini pendapatan per kapita mencapai nilai yang maksimum. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimum.

Pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk maka akan terdapat peetambahan *output* atau hasil (Sukirno: 2010).

b. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori pertumbuhan Neo Klasik melihat dari sudut pandangan yang berbeda, yaitu dari segi penawaran. Menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi.

Dalam analisis Solow, membentuk formula matematik untuk persamaan itu dan seterusnya membuat pembuktian secara kajian empiris untuk menunjukkan kesimpulan berikut; *Faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah penambahan modal dan penambahan tenaga kerja. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.*

Teori ini beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja (Domar: 1947)

B. Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata ialah aktivitas perjalanan yang dilakukan sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur dan tujuan-tujuan lainnya (Drs. Oka: 1996).

Pariwisata merupakan suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar dan mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu Negara itu sendiri ataupun diluar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu dalam mencari dan memperoleh kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya (dimana ia tinggal) (Prof. Salah Wahab), sedangkan menurut UU Nomor 10 Tahun 2009 bahwa Pariwisata ialah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

2. Permintaan dan Penawaran Pariwisata

a. Permintaan Pariwisata

(Schwarz, 1963:72 pada Drs. Oka: 1979) dalam bukunya "*Konsumenten schutz Im Turismus*" menjelaskan bahwa satu hal yang patut diingat bahwa seorang wisatawan tidak ingin dan tidak mungkin hanya mengkonsumsi salah satu macam produk saja (*single product or single service*) tetapi juga merupakan konsumsi dari macam produk atau pelayanan dari bermacam-macam perusahaan berbeda-beda dan terpisah pula. Dan (Spillane, 2001:103 pada Drs Oka: 1979) juga menjelaskan bahwa, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi permintaan akan pariwisata adalah mobilitas. Mobiltas manusia timbul atas berbagai macam dorongan kebutuhan atau kepentingan yang disebut dengan istilah motivasi, yang dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Dorongan kebutuhan dagang atau ekonomi;
- 2) Dorongan kebutuhan kepentingan politik;
- 3) Dorongan kebutuhan keamanan;
- 4) Dorongan kebutuhan kesehatan;
- 5) Dorongan kebutuhan pemukiman;
- 6) Dorongan kebutuhan kepentingan keagamaan;
- 7) Dorongan kebutuhan kepentingan pendidikan atau studi;
- 8) Dorongan kebutuhan minat kebudayaan;
- 9) Dorongan kebutuhan hubungan keluarga;
- 10) Dorongan kebutuhan untuk rekreasi (dalam arti luas);

Motivasi-motivasi tersebut tumbuh dari kepentingan-kepentingan hidup manusia. Oleh karena kehidupannya dalam masyarakat wajar maka aktivitas-aktivitas permintaan tumbuh layak untuk dipenuhi dan disediakan.

b. Penawaran Pariwisata

Sejak kepariwisataan menjadi industri yang populer terutama karena ekonomisnya, praktis, setiap negara berminat mengembangkan dirinya sebagai salah satu tujuan wisata. Keadaan alam dan masyarakat negara-negara berkembang menjadi andil utama untuk diminati dan menjadi daya tarik yang kuat di pasaran wisata dunia. Persaingan di antara sesama negara destinasi menjadi semakin tajam dan satu-satunya harapan pertumbuhan suatu negara tujuan wisata terletak pada persiapan apa yang ditawarkan itu supaya memadai dengan permintaan.

Penawaran (*supply*) adalah kuantitas dari barang-barang ekonomi yang ditawarkan dengan semua harga yang mungkin dapat dicapai pada waktu tertentu.

Penawaran dalam kepariwisataan mempunyai ciri khas, misalnya :

- 1) Merupakan penawaran jasa-jasa (*service supply*). Jenis penawaran seperti ini karena sifatnya yang umum tidak bisa ditimbun dan dikonsumsi di mana jasa tersebut dihasilkan.
- 2) Penawaran sangat kaku (*rigid*), karena itu eksploitasnya sangat sukar menyesuaikan diri untuk keperluan lain.
- 3) Penawaran dalam kepariwisataan sangat tergantung pada persaingan dari penawaran barang-barang dan jasa-jasa lainnya. Karena itu "*the Law of Substitution*" akan sangat mempengaruhinya.

Penawaran dalam kepariwisataan dapat dibagi dalam :

- 1) Benda-benda yang disediakan dan terdapat dalam alam (*Natural Amenities*).
 - a. Iklim
 - b. Bentuk tanah yang pemandangan
 - c. Hutan belukar dan huan luas
 - d. Fauna dan Flora
 - e. Sumber air mineral
- 2) Hasil ciptaan manusia (*Man-made Supply*)
 - a. Monumen-monumen bersejarah dan sisa-sisa peradaban di masa lampau
 - b. Museum, *art gallery*, perpustakaan, kesenian rakyat

- c. Acara-acara tradisional
 - d. Rumah-rumah beribadah
- 3) Prasarana (*Infrastructure*)
- a. Prasarana umum (sumber air tawar, pembangkit listrik, jalan raya, jembatan, bandara udara, pelabuhan laut, telekomunikasi, dan lainnya)
 - b. Kebutuhan masyarakat banyak (rumah sakit, apotik, shopping center, bank, kantor pos, pom bensin, kantor-kantor yang berhubungan dengan kepariwisataan dan sebagainya)
- 4) Sarana kepariwisataan (*Tourism Superstructures*)
- a. Sarana pokok kepariwisataan (agen travel, transportasi wisatawan, rumah makan atau restoran, dan sebagainya)
 - b. Sarana pelengkap kepariwisataan (fasilitas rekreasi seperti: sky, resort, horse riding, boating facilities, hunting safary, dan lainnya)
 - c. Sarana penunjang kepariwisataan (*Night Club and Steambath, Souvenir shops*, dan lain sebagainya)
- 5) Tata cara hidup masyarakat
- a. Pembakaran mayat (Ngaben) di Bali
 - b. Upacara pemakaman mayat di Tanah Toraja
 - c. Upacara Sekaten di Yogyakarta
 - d. Upacara Waisak di Candi Mendut dan Borobudur, dan lainnya.

3. Pariwisata Sebagai Industri

Bila orang mendengar kata industri, gambaran dari kebanyakan orang tentang suatu industri adalah suatu bangunan pabrik yang mempunyai cerobong asap dengan menggunakan mesin-mesin dalam proses produksinya. Ini adalah gambaran industri pada umumnya, tetapi industri pariwisata jauh berbeda dengan itu. Karena secara ringkas pengertian industri pariwisata itu, berupa apa produk yang dihasilkan dan siapa produsennya, yang bertanggung jawab tentang kualitas produk yang dipasarkan.

Industri pariwisata terdiri dari beberapa komponen yang merupakan mata rantai yang panjang. Menurut (Drs. H. Oka, dan A. Yoeti, MBA. 1996) komponen-komponen tersebut antara lain (a) Biro Perjalanan; (b) Motel dan Restoran; (c) Usaha Angkutan; (d) Suvenir (cinderamata); (f) Bandara Udara; Agar wisatawan dapat menikmati produk wisata, maka seluruh komponen tersebut harus merupakan satu kesatuan yang saling menjalin kerja sama yang serasi. Menurut (Schmoll, 1977:30) dalam bukunya *Tourism Promotion* memberi batasan tentang industri pariwisata sebagai berikut: *“Tourism is a highly decentralized industry consisting of enterprises different in size, location, function, type organization, range of service provided and method used to market and sell them”* bahwa industri pariwisata bukanlah industri yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu industri yang terdiri dari serangkaian perusahaan yang menghasilkan jasa atau produk yang berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan itu tidak hanya dalam jasa yang dihasilkan, tetapi juga dalam besarnya perusahaan,

lokasi tempat kedudukan, letak geografis, fungsi, bentuk organisasi yang mengelola dan metode atau cara pemasarannya.

4. Sarana dan Prasarana Kepariwisata

Baik prasarana maupun sarana kepariwisataan sesungguhnya merupakan “*tourist supply*” yang perlu dipersiapkan atau disediakan bila kita hendak mengembangkan industri pariwisata. Prasarana dalam kepariwisataan sama seperti prasarana dalam perekonomian pada umumnya, karena kegiatan kepariwisataan pada hakekatnya tidak lain adalah salah satu sektor kegiatan perekonomian juga.

Yang dimaksudkan dengan prasarana (*infrastructure*) adalah semua fasilitas yang memungkinkan proses perekonomian dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi fungsinya adalah melengkapi sarana kepariwisataan sehingga dapat memberikan pelayanan sebagaimana mestinya. Dalam pengertian ini yang termasuk dalam prasarana adalah:

a. Prasarana Umum (*general Infrastructure*)

Yaitu prasarana yang menyangkut kebutuhan umum bagi kelancaran perekonomian. Adapun yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya ialah:

- Sistem penyediaan air bersih
- Pembangkit tenaga listrik
- Jaringan jalan raya dan jembatan
- Bandar Udara, pelabuhan laut, terminal, stasiun
- Kapal tambang (Ferry), kereta api, dan lain-lain

- Telekomunikasi

b. Kebutuhan Masyarakat Banyak (*Basic Needs of Civilized Life*)

Yaitu prasarana yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak dan termasuk dalam kelompok ini ialah:

- Rumah Sakit
- Apotik
- Bank atau Anjungan Tarik Mandiri/ *Automatic Teller machine* (ATM)
- Kantor Pos
- Pompa Bensin
- *Administration Offices* (Pemerintahan Umum, Polisi, Pengadilan, Badan-Badan Legislatif, dan sebagainya)

Tanpa adanya prasarana tersebut di atas sukarlah bagi sarana-sarana kepariwisataan dapat memenuhi fungsinya untuk memberikan pelayanan bagi wisatawan dan *traveller* lainnya.

Sedangkan Sarana Kepariwisataan memiliki tiga jenis, dimana satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Dalam hubungan usaha setiap negara untuk membuat wisatawan lebih banyak datang, lebih lama tinggal, lebih banyak mengeluarkan uangnya di tempat yang dikunjunginya, maka ketiga sarana ini sangat memegang peranan penting. Ketiga sarana yang dimaksudkan ialah:

a. Sarana Pokok Kepariwisataan (*Main Tourism Superstructure*)

Yang dimaksudkan dengan sarana pokok kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan yang hidup dan kehidupannya tergantung kepada lalu

lintas wisatawan dan *traveller* lainnya. Fungsinya adalah menyediakan fasilitas pokok yang dapat memberikan pelayanan bagi kedatangan wisatawan. Sarana semacam ini harus diadakan, pembangunannya harus diarahkan, apalagi dalam hendak menarik lebih banyak wisatawan.

Adapun perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kelompok ini adalah:

- Perusahaan-perusahaan yang usaha kegiatannya mempersiapkan dan merencanakan perjalanan wisatawan
- Perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan di daerah tujuan ke mana wisatawan pergi.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Harry G. Clement pada Drs. H. Oka, dan A. Yoeti, MBA. 1996 bukunya *The Future of In Pacific and Far East*, pemencaran pengeluaran wisatawan digunakan keperluan hal-hal sebagai berikut.

Tabel 2.1

PEMENCARAN PENGELUARAN WISATAWAN

1	<i>Accommodation (akomodasi)</i>	25,4 %
2	<i>Food and Beverages</i>	38,8 %
3	<i>Purchases</i>	26,3 %
4	<i>Local Transportation</i>	4,5 %
5	<i>Others</i>	5,0 %
		100 %

Sumber : Drs. H. Oka A. Yoeti, MBA. 1979. *Pemasaran Pariwisata*. Bandung

Jadi hampir 70% dari pengeluaran wisatawan dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang termasuk sarana pokok kepariwisataan. Disinilah letak arti pentingnya sarana pokok sesuai dengan istilah dan fungsinya sendiri.

b. Sarana Pelengkap Kepariwisata (Supplementing Tourism Superstructure)

Yang dimaksud dengan sarana pelengkap kepariwisataan, adalah fasilitas-fasilitas yang dapat melengkapi sarana pokok sedemikian rupa, sehingga fungsinya dapat membuat wisatawan lebih lama tinggal di tempat atau di daerah yang dikunjunginya.

c. Sarana Penunjang Kepariwisata (Supporting Tourism Superstructure)

Yang dimaksud dengan sarana penunjang kepariwisataan, adalah fasilitas yang diperlukan wisatawan (khususnya *business tourist*), yang berfungsi tidak hanya melengkapi sarana pokok dan sarana pelengkap, tetapi fungsinya lebih penting adalah agar wisatawan membelanjakan uangnya di tempat yang dikunjunginya tersebut. Termasuk kedalam kelompok ini adalah : *Night Club*, *Steambath*, *Souvenir shop*, bioskop, dan opera. Sarana semacam ini perlu diadakan untuk wisatawan, tetapi tidaklah begitu mutlak pengadaannya, karena tidak semua wisatawan senang dengan kegiatan tersebut.

5. Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ditetapkan mengenai sumber Pendapatan Daerah :

a. Pendapatan Asli daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Bab V Pasal 6, terdiri dari :

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan.
- 4) Sumber pendapatan Asli Daerah selanjutnya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- 5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Sebagai contoh :

- Jasa Giro
- Pendapatan Bunga
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah

b. Dana Perimbangan

Diperoleh dari bagian daerah, penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan yang berasal dari sumber daya alam serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

c. Pinjaman Daerah

Pinjaman pemerintah daerah merupakan pinjaman dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, sehingga saat ini pemerintah daerah belum diijinkan mengajukan pinjaman kepada pihak asing. Pinjaman pemerintah daerah biasanya dilakukan untuk menutupi kekurangan anggaran belanja daerah tetapi dilakukan oleh atau bekerja sama dengan pemerintah pusat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah seperti telah di uraikan diatas diupayakan agar selalu mengalami peningkatan, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan pendapatan sektor pariwisata di wilayah yang bersangkutan.

6. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Pariwisata

Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh satu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern. Tidak ada satu negara akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai jenis kegiatan pembangunan, oleh karena itu proses pembangunan harus terus berlanjut karena tingkat kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat bersifat relatif dan tidak akan pernah dicapai secara absolut. Menurut Subadra (2001) mengenai peran-peran pemerintah dalam bidang pariwisata adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Pariwisata

Pariwisata merupakan industri yang memiliki kriteria-kriteria khusus, mengakibatkan dampak positif dan negatif. Untuk memenuhi kriteria tersebut, memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata, diperlukan perencanaan pariwisata yang matang.

b. Pembangunan Pariwisata

Pembangunan pariwisata umumnya dilakukan oleh sektor swasta terutama fasilitas dan jasa pariwisata. Namun, pengadaan infrastruktur umum seperti jalan, listrik dan air yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata terutama untuk proyek-proyek yang berskala besar yang memerlukan dana yang sangat besar seperti pembangunan bandara udara, jalan untuk transportasi darat, proyek penyediaan air bersih, dan proyek pembuangan limbah merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu pemerintah juga berperan sebagai penjamin dan pengawas para investor yang menanamkan modalnya dalam bidang pembangunan pariwisata.

c. Kebijakan Pariwisata

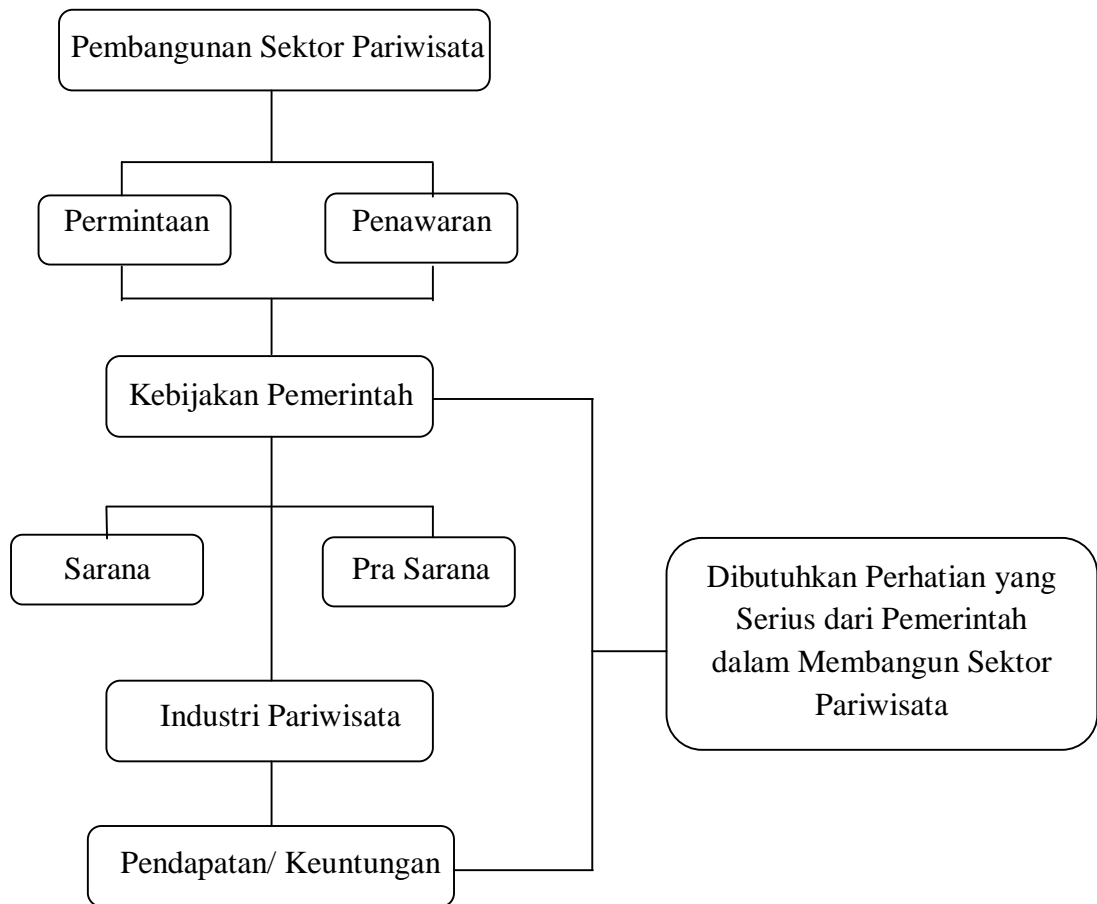
Kebijakan merupakan jangka panjang yang mencakup tujuan pembangunan pariwisata atau prosedur pencapaian tujuan tersebut dalam pernyataan formal seperti hukum dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Kebijakan pemerintah harus sepenuhnya dijadikan panduan dan ditaati para *stakeholder*.

d. Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah memiliki peran yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Peraturan-peraturan penting yang harus dibuat pemerintah untuk kepentingan tersebut adalah:

- Ø Peraturan perlindungan bagi wisatawan terutama bagi biro perjalanan wisata yang mengharuskan wisatawan membayar uang muka (*deposit payment*) sebagai jaminan pemesanan jasa akomodasi, dan lain-lain
- Ø Peraturan keamanan kebakaran yang mencakup pengaturan mengenai jumlah minimal lampu yang ada di masing-masing lantai hotel dan alat pendukung keselamatan lainnya.
- Ø Peraturan keamanan makan dan kesehatan yang mengatur mengenai standar kesehatan makanan yang disuguhkan kepada wisatawan
- Ø Peraturan standar kompetensi pekerja-pekerja yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus seperti pilot, sopir dan nahkoda.

7. Kerangka Konseptual



Dalam membangun suatu perekonomian, salah satunya sektor pariwisata sangat memperhatikan permintaan dan penawaran terhadap wisatawan. Hal ini sebagai kebutuhan primer terhadap perilaku wisatawan. Pemerintah diharapkan dapat memberikan fasilitas-fasilitas yang mendukung terhadap kebutuhan primer wisatawan. Dukungan tersebut baik bersifat finansial ataupun moral akan memberikan kepuasan terhadap wisatawan.

Sarana dan pra sarana merupakan sebagai faktor pendukung di dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan wisatawan. Infrastruktur, akomodasi, hotel, layanan panduan wisata, serta keamanan dapat memberikan nilai kepuasan dalam

perjalanan wisatawan. Dalam mengembangkan obyek wisata tersebut menjadi wisata yang unggul, maka dibutuhkan kerjasama kepada pihak swasta, industri ataupun masyarakat di dalam mengelola pengembangan kawasan wisata untuk mencapai proses pembangunan wisata yang maju. Hal demikian akan memberikan kontribusi kawasan wisata terhadap pendapatan daerah melalui retribusi wisata, pajak industri, serta pendapatan dari fasilitas-fasilitas pendukung kawasan wisata tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai sasarannya, maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang bukan merupakan bilangan, tetapi berupa ciri-ciri, keadaan, atau gambaran dari kualitas objek yang diteliti. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat.

B. Definisi Operasional Variabel

Pariwisata adalah suatu obyek yang memberikan hasil kepuasan dalam menikmati suatu hal. Biasanya pariwisata tergolong kepada keindahan alam dan beberapa peninggalan yang memiliki sejarah.

Kebijakan pemerintah adalah suatu keputusan atau wewenang yang dimiliki pemerintah setempat dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi pokok kegiatan pemerintahan. Adapun di antaranya menjadi keputusan mutlak bagi pemerintah setempat dalam melaksanakan kebijakan daerah dikarenakan keberlakuan otonomi daerah.

Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy market*. Untuk mempengaruhi birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dan hari ke hari yang

membawa dampak pada warga negaranya, dalam literatur administrasi (Subarsono, 2005:87)

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara

2. Waktu Penelitian

Penelitian direncanakan dalam waktu 2 (dua) bulan, yaitu dari Bulan September 2017 hingga Bulan November 2017

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 68). Populasi dalam penelitian ini adalah objek wisata yang berada di Kabupaten Humbang Hasundutan dalam 10 (sepuluh) kecamatan.

2. Sampel

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari

sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representative (Sugiyono, 2011:68). Pengambilan sampel diambil melalui teknik *Dispropotionate Stratified Random Sampling* yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel, jika populasi bertingkat-tingkat tetapi tidak proporsional. Dalam penelitian ini hanya diambil 2 kecamatan yang akan dijadikan sampel, yaitu: Kecamatan Paranginan dan Kecamatan Baktiraja.

Kecamatan Paranginan merupakan satu kecamatan yang memiliki potensi alam sebagai obyek wisata yang bernama “Wisata Alam Sipinsur”. Di wisata ini akan memanjakan wisatawan dengan pemandangan alam Danau Toba dari kejauhan. Wisata alam di kecamatan ini sudah memberikan kontribusi kepada pemerintah kabupaten dalam bentuk retribusi wisata.

Berbeda dengan Kecamatan Baktiraja, di kecamatan ini tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan wisata. Dilihat dari pengelolaan kawasan wisata masih dikelola oleh masyarakat setempat. Dan fasilitas-fasilitas yang terdapat di kawasan wisata tersebut belum layak dijadikan sebagai obyek wisata. Namun pada kenyataannya potensi wisata di Kecamatan Baktiraja memiliki potensi wisata yang sangat menarik perhatian wisatawan. Potensi wisata tersebut meliputi, pariwisata alam dan pariwisata sejarah.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fenomena yang diamati. Dan data kuantitatif berguna menambah data-data pendukung dalam menganalisa penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang merupakan data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti dengan melakukan penelitian langsung berupa kunjungan pada obyek wisata serta wawancara terhadap masyarakat setempat dan pemerintah daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan. Dan data sekunder menjadi pedoman sebagai alat untuk melakukan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi. Yang merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2012:145). Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan akan memecahkan masalah-masalah yang ada sehingga data tersebut harus benar-benar terpercaya dan akurat. Pengamatan ataupun kunjungan langsung akan memberikan

informasi-informasi yang terdiri dari masyarakat dan pemerintah daerah sehingga tidak memberikan pro dan kontra terhadap penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh. Dan data akan disajikan dalam bentuk dan diagram.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara. Kabupaten ini di resmikan pada tanggal 28 Juli 2003 dan beribukota Dolok Sanggul. Kabupaten ini memiliki populasi total 171.650 jiwa pada tahun 2010 dengan kepadatan 73,5 jiwa/km². Kabupaten ini terletak pada garis 2°1' – 2°28' Lintang Utara dan 98°10' – 98°58' Bujur Timur dan berada di bagian tengah wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut :

1. Sebelah Timur dengan Kabupaten Tapanuli Utara
2. Sebelah Selatan dengan kabupaten Tapanuli Tengah
3. Sebelah Barat dengan Kabupaten Pakpak Bharat
4. Sebelah Utara dengan Kabupaten Samosir

Luas Kabupaten Humbang Hasundutan adalah 251.765,93 Ha yang terdiri dari 10 kecamatan dan 154 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Parlilitan dan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Baktiraja. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Humbang Hasundutan

Kecamatan	Luas (ha)
1. Pakkat	38 168, 00
2. Onan Ganjang	22 256, 27
3. Sijamapolang	14 018, 07
4. Dolok Sanggul	20 929, 53
5. Lintong Nihuta	18 126, 03
6. Paranginan	4 778, 06
7. Baktiraja	2 231, 91
8. Pollung	32 736, 46
9. Parlilitan	72 774,71
10. Tarabintang	24 251, 98
Daratan	250 271, 02
Luas Danau	1 494, 91
Luas Total	251 765, 93

Sumber : Surat Edaran Bupati Humbang Hasundutan
No130/1647/Pem/XI/2007 12 November 2007

Dilihat dari tabel ini bahwa total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah 251.765,93 Ha. Total tersebut sudah meliputi wilayah luas danau 1.494,91 Ha yang merupakan perairan Danau Toba.







B. Hasil Penelitian

Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki potensi wisata yang dapat dijadikan salah satu sektor pendukung dalam penerimaan pendapatan daerah dan memiliki kesempatan menarik wisatawan dalam menikmati keindahan potensi wisata. Baik wisata alam, sejarah/ budaya, dan geosite bakkara. Dalam

kesempatannya Kabupaten Humbang Hasundutan dapat menjadi salah 1 (satu) kabupaten yang diminati wisatawan dalam wisata Danau Toba. Berikut adalah obyek wisata di Kabupaten Humbang Hasundutan dalam setiap kecamatannya.

Tabel 4.2
Obyek Wisata di Kabupaten Humbang Hasundutan
pada setiap kecamatan

No	Kecamatan	Obyek Wisata	
1	Baktiraja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istana Sisingamangaraja XII 2. Air Terjun Binangajanji 3. Pulau Simamora 4. Aek Sipangolu 5. Hariara Partungkoan 	
2	Paranginan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wisata Alam Sipinsur 2. Goa Sitambunan 	
3	Parlilitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Markas Sisingamangaraja XII Sionomhudon 2. Makam putri Sisingamangaraja XII 3. Air Terjun Aek Simonggo 4. Air Terjun Sibabo 5. Air Terjun Sipang 	
4	Pakkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Air Terjun Namossarangan 2. Air Terjun Tahur Jati 3. Air Terjun Sipulak 4. Air Terjun Pollung 5. Air Terjun Simandame 	

5	Dolok Sanggul	1. Aek Silang	
6	Sijamapolang	1. Aek Sibundong	
7	Onanganjang	1. Air Terjun Ompu Sarne 2. Air Terjun Nadumangor 3. Air Terjun Raja Panopa 4. Air Terjun Nadumangor	
8	Lintong Nihuta	1. Tao Silosung 2. Tao Sipinggan 3. Dolok Pesona	
9	Tarabintang	1. Ulok Batu 2. Air Terjun Sibokkik 3. Air Terjun Simursa 4. Makam 37 Panglima Raja Sisingamangaraja XII	
10	Pollung	1. Tao Silom 2. Ulu Darat (Histori si Raja Lontung) 3. Air Terjun Sampuren	

Sumber : Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan 2017

Potensi pariwisata di kabupaten ini sangat baik. Seluruh kecamatan yang ada di kabupaten ini memiliki potensi pariwisata yang sangat menarik perhatian para wisatawan. Baik dari lokal ataupun mancanegara. Didukung oleh cuaca di kabupaten ini sangat banyak diminati para wisatawan. Karena kabupaten ini terletak di daerah pegunungan, sehingga cuaca di daerah ini sangat sejuk walaupun di siang hari.

1. Obyek Wisata Kawasan Danau Toba

Destinasi Pariwisata Kawasan Danau Toba yang direncanakan oleh pemerintah pusat, sangatlah memberikan keuntungan kepada Pemerintah kabupaten Humbang Hasundutan. Baik secara sarana dan prasarana ataupun promosi secara tidak langsung akan memperkenalkan obyek wisata di Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi perhatian para wisatawan.

Kecamatan Baktiraja dan Kecamatan Paranginan memiliki potensi yang sangat mendukung dalam persaingan pasar pariwisata di kawasan wisata alam Danau Toba. Dikarenakan kawasan tersebut sangat mendukung dan berpotensi dijadikan modal bagi Kabupaten Humbang Hasundutan. Sebagai contoh di Kecamatan Baktiraja. Sewaktu peneliti melakukan kunjungan wisata ke daerah tersebut, di perjalanan menuju ke lokasi wisata sudah mendapati keindahan. Pemandangan Danau Toba, tebing-tebing dan kawasan pertanian masyarakat yang tersusun sangat indah. Selanjutnya, setelah menelusuri beberapa obyek wisata seperti: istana sisingamangaraja XII, air terjun binangajanji dan restoran terapung semakin memberikan inspirasi kepada penulis bahwa pariwisata tidak hanya

berupa keindahan alam, namun sejarah dan budaya dapat dijadikan obyek pariwisata yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih lokasi wisata. Berikut adalah beberapa gambar yang diambil penulis selama penelitian di Kecamatan Baktiraja:

Gambar 4.1

Obyek Wisata di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan
Istana Sisingamangaraja XII



Rumah Adat Batak
di Wilayah Perkampungan Sisingamangaraja XII



Obyek Wisata Air Terjun Binangajanji



Dari hasil penelitian area pariwisata di Kecamatan Baktiraja, obyek wisata di daerah tersebut masih dikelola oleh masyarakat. Hal tersebut dilihat dari lokasi wisata yang belum memiliki retribusi dari Dinas Pariwisata. Namun sentuhan pemerintah kabupaten sudah mulai dilihat melalui pembangunan penatapan di area Desa Bakkara dan properti pemerintah kabupaten, seperti: tempat sampah dan properti pendukung lainnya.

Dalam kunjungan peneliti ke obyek pariwisata di Kecamatan Paranginan juga tidak kalah menarik perhatian. Kawasan Obyek Wisata Sipinsur memiliki potensi yang sangat baik, selain pemandangan alam Danau Toba, obyek ini juga sudah dilengkapi taman bermain anak-anak. Sehingga sudah sangat mendukung untuk kegiatan wisata keluarga. Berikut adalah gambar yang diambil oleh peneliti dalam kunjungan wisata di Kawasan Obyek Wisata Sipinsur:

Gambar 4.2

Obyek Wisata di Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan
Pemandangan Alam Danau Toba
di Obyek Wisata Sipinsur



Pemandangan Alam dan Kunjungan Wisatawan
di Kawasan Wisata Alam Sipinsur



Dalam kunjungan peneliti pada dua (2) kecamatan tersebut fasilitas prasarana kepariwisataan umum sudah sangat mendukung. Dilihat dari; pembangkit listrik, jalan raya, telekomunikasi sudah tersedia dalam kunjungan kepariwisataan. Namun sarana pokok kepariwisataan masih belum tersedia. Seperti; *Travel Agent* dan *Tour Operator*, *Tourist Transportation*, *Accommodation* dan sarana penunjang lainnya seperti; *Souvenir Shops*.

2. Sarana dan Prasarana Kepariwisata

Kunjungan wisatawan di Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami peningkatan, dilihat dari jumlah sarana pariwisata seperti hotel/ penginapan mengalami peningkatan jumlah. Pada tahun 2014/ 2015 jumlah hotel/ penginapan berjumlah 5 (lima), dan mengalami peningkatan di tahun 2015/ 2016 sebanyak 11 (sebelas). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Promosi dan Kelembagaan (Barthon Naibaho) dan Kepada Seksi Pengembangan dan Pelestarian (Indra Hutabarat) Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan melalui diskusi peneliti bahwa jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 4.3

Pendataan Sarana Pariwisata

Data Hotel/ Penginapan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015/2016

No	Nama Kecamatan	Nama Hotel	Tarif (ribu)	Kelas	Jumlah Tamu / bulan
1	Dolok Sanggul	Grand Maju Hotel	Standart: 250 Executive: 400	III	270/ Bulan
2		Hotel Bersama	Standart: 135 Superior: 295	Melati	210/ Bulan
3		Hotel Bukit Tinggi	Standart: 100 Superior: 300	Melati	250/ Bulan
4		Hotel Asima	Standart: 100 Superior: 200	Melati	150/ Bulan
5		Penginapan Martabe		Melati	100/ Bulan
6		Hotel Horas		Melati	100/ Bulan
7		JJ. House Hotel		Melati	100/ Bulan
8	Baktiraja	Guest House Tipang Mas	Standart: 150		
9		Wisma Nasional			
10		Penginapan Anugerah Siambaton (Home Stay)			
11	Pakkat	Ariesya Hotel		Ekonomi	100/ Bulan

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan

Prasarana kepariwisataan di Kabupaten Humbang Hasundutan sudah sangat mendukung. Dilihat dari prasarana umum kepariwisataan menuju lokasi wisata, seperti; pembangkit tenaga listrik, jalan raya, jembatan, telekomunikasi, pelabuhan danau, dan lapangan udara. Prasarana lapangan udara tidak berada di Kabupaten Humbang Hasundutan, melainkan di Kabupaten Tapanuli Utara. Namun keberadaan lapangan udara tersebut sangat memberikan keuntungan bagi pemerintah kabupaten jika wisatawan mengunjungi obyek wisata di Kabupaten Humbang Hasundutan, dikarenakan jarak antara lapangan udara (Bandara Silangit) dengan Dolok Sanggul (ibukota Kabupaten Humbang Hasundutan) dapat di tempuh dengan waktu 45 menit.

C. Kebijakan Pemerintah Kabupaten terhadap Pembangunan Pariwisata

Kebijakan pemerintah kabupaten dalam pembangunan pariwisata masih mengalami keterbatasan. Dikarenakan anggaran pemerintah daerah masih terbatas untuk sektor pariwisata dan pemerintah daerah masih mengalami permasalahan dalam mengembangkan pembangunan pariwisata. Hal ini disampaikan langsung oleh Dinas Pariwisata dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Humbang Hasundutan. Masalah tersebut antara lain:

1. Status lahan (terutama pada obyek sejarah), lahan tersebut milik masyarakat dan keberadaan adat masih menjadi faktor masyarakat dalam mempertahankan lahan
2. Pembangunan sarana umum kepariwisataan masih belum sesuai standarisasi seperti hotel

3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ruang lingkup wisata

Namun disamping itu, Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan sedang menyusun rencana dalam mengembangkan kepariwisataan di kabupaten tersebut terkhususnya di Kawasan Wisata Danau Toba. Rencana pengembangan tersebut antara lain adalah:

1. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Wilayah Kabupaten
2. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) distribusi pariwisata
3. Menjadikan Desa Bakkara (Kecamatan Baktiraja) sebagai wisata tirta dan wisata sejarah
4. Menjadikan wisata tirta (wilayah khusus) sebagai lokasi arung jeram
5. Menjadikan *Geopark* sebagai miniatur kaldera toba
6. Menjadikan Wisata Sipinsur sebagai wisata alam dan peninggalan *Geoside*
7. Pembinaan kepada masyarakat (bahasa dan budaya)

Dalam proses pengembangan sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sudah menerapkan beberapa langkah dalam pembangunan potensi pariwisata. Beberapa diantaranya adalah:

1. Pembangunan gapura obyek wisata sipinsur
2. Pembangunan fasilitas pendukung di obyek wisata sipinsur
3. Pembangunan fasilitas pendukung di obyek wisata bakkara (Kecamatan Baktiraja)
4. Pembangunan infrastruktur pada sektor pariwisata

D. Analisis Penelitian

Dalam mengembangkan pembangunan sektor pariwisata tidaklah dapat dilakukan oleh satu pihak instansi pemerintah. Dan tidak bisa dikembangkan hanya sebatas pembangunan. Ditambah lagi jika sektor pariwisata tersebut akan dijadikan sebagai sektor pariwisata dalam destinasi nasional. Namun pihak lain juga harus turut serta membangun sektor pariwisata dan mendukung proses kegiatan pembangunan tersebut. Seperti:

1. Pemerintah Pusat, bertujuan sebagai sektor pendukung. Baik secara moral dan materil.
2. Instansi terkait, bertujuan sebagai pendukung dalam pengembangan pembangunan sektor pariwisata. Seperti: Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bidang Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi lain yang berkaitan dalam kepariwisataan
3. Perusahaan Swasta, bertujuan sebagai pendukung materil dan sarana. Seperti: hotel, restoran dan *cafe*, *travel agent*, *tour operator*, *tourist transportation*, *accomodation*, *souvenir shops*, dan fasilitas rekreasi
4. Masyarakat, hubungan masyarakat sangatlah penting dalam mengembangkan pembangunan pariwisata. Dikarenakan masyarakatlah yang sangat dekat dengan obyek dan dalam ruang lingkup obyek. Diharapkan peran pemerintah dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa ruang lingkup mereka dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan kabupaten dan masyarakat itu sendiri.

Dalam mencapai pembangunan yang maksimal, pemerintah kabupaten harus melihat kebutuhan (permintaan) dari pada wisatawan. Jika obyek wisata yang dituju memerlukan perjalanan yang panjang, pemerintah kabupaten sebaiknya mempersiapkan fasilitas sarana *tourism transportation* sebagai fasilitas bantu wisatawan menuju obyek wisata. Atau dapat menggunakan fasilitas sarana *travel agent*, jika obyek wisata yang akan dituju wisatawan lebih dari satu (1) lokasi. Dan kelengkapan sarana pokok, pelengkap, dan penunjang kepariwisataan sebagai prioritas dalam mengembangkan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Humbang Hasundutan. Karena, setelah peneliti mengunjungi beberapa obyek wisata di Kabupaten Humbang Hasundutan (Kecamatan Paranginan dan Kecamatan Baktiraja) fasilitas prasarana sudah cukup melengkapi. Seperti halnya: jalan raya, telekomunikasi, pembangkit tenaga listrik, dan pelabuhan danau sudah melengkapi untuk kegiatan kepariwisataan.

Permintaan dan penawaran dalam kepariwisataan merupakan suatu kegiatan yang dapat memberikan pendapatan dan keuntungan bagi pemerintah kabupaten. Hanya saja dalam mencapai tersebut, pemerintah kabupaten harus mempersiapkan penawaran dari segala bentuk permintaan wisatawan. Sehingga kebutuhan wisatawan dapat terpenuhi dan memberikan nilai kepuasan yang maksimal kepada wisatawan.

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam pembangunan sektor pariwisata masih mengalami keterlambatan. Dengan kondisi potensi yang sangat besar belum

mendukung dengan sarana dan prasarana yang ada. Sehingga permintaan dan penawaran kepariwisataan masih belum terjalin. Dalam penelitian ini, peneliti melihat potensi alam di Kabupaten Humbang Hasundutan sangat berpotensi. Terlebih lagi di kawasan wisata Danau Toba. Kawasan ini memiliki potensi wisata yang lebih dari sekedar pemandangan alam. Namun, sejarah, peninggalan batu (*geoside*) dan *geoside* mampu dijadikan sebagai tambahan dalam pengetahuan, terkhususnya bagi pelajar. Sehingga mampu memberikan wawasan dan lebih mengingat kembali sejarah serta asal-usul pahlawannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya. Selanjutnya untuk mendukung pengembangan dan pembangunan sektor pariwisata, pemerintah membentuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba yang ditetapkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2016. Hal tersebut untuk mendukung Kawasan Pariwisata Danau Toba menjadi Destinasi Pariwisata Nasional.

Destinasi Pariwisata Nasional memiliki fungsi untuk menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata. Dan bertujuan sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat.

Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu kabupaten yang mendapati kedudukan di ruang lingkup Kawasan Pariwisata Danau Toba, namun ketika peneliti menelusuri obyek wisata di sekitaran ruang lingkup tersebut, peneliti mendapati kekurangan dalam sarana kepariwisataan. Seperti halnya sarana pokok, sarana pelengkap, dan sarana penunjang kepariwisataan. Disamping keterbatasan pemerintah kabupaten dalam mengembangkan pembangunan sektor

pariwisata, seharusnya pemerintah kabupaten mempersiapkan strategi prioritas guna menghadapi persaingan pasar dalam kegiatan kepariwisataan.

Dalam analisis ini, peneliti menilai jika dalam mengembangkan pembangunan sektor pariwisata, pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menempatkan anggaran untuk sektor pariwisata terlalu minim (kecil). Jika dilihat dari realisasi pengeluaran daerah pada tahun 2016 untuk bidang pariwisata dan budaya adalah Rp. 1.607.000.000,00. Sedangkan kebutuhan sektor pariwisata begitu besar, dilihat dari ruang lingkup pariwisata di Kabupaten Humbang Hasundutan bahwa seluruh kecamatan di kabupaten tersebut memiliki potensi wisata dan terlebih lagi bahwa dua (2) kecamatan di kabupaten tersebut mendapati wilayah kawasan Danau Toba.

Prioritas pembangunan infrastruktur sudah bisa digantikan dengan prioritas pengembangan pembangunan sarana kepariwisataan. Dikarenakan pembangunan prasarana umum dan fasilitas kebutuhan masyarakat banyak sudah cukup terpenuhi. Seperti halnya salah satu prasarana umum yang sangat penting dibawah ini yang sudah cukup baik.

Tabel 5.1
Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan (km)
Di Kabupaten Humbang Hasundutan, 2014-2015

No	Nama Kecamatan	Aspal		Batu		Kerikil	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
1	Paranginan	42,22	45,72	1,30	0,80	-	-
2	Baktiraja	26,55	27,05	-	0,30	-	-

Sumber : Data Kabupaten Humbang Hasundutan dalam angka 2017

Tabel tersebut menjelaskan jika jalan raya (prasarana umum) sudah cukup sangat baik. Dikarenakan jika dilihat dari jenis permukaan jalan berupa kerikil sama sekali tidak mendapati permasalahan.

B. Saran

Dalam mengembangkan pembangunan sektor pariwisata tidaklah dapat dilakukan oleh satu pihak instansi pemerintah. Dan tidak bisa dikembangkan hanya sebatas pembangunan. Ditambah lagi jika sektor pariwisata tersebut akan dijadikan sebagai sektor pariwisata dalam destinasi nasional. Namun pihak lain juga harus turut serta membangun sektor pariwisata dan mendukung proses kegiatan pembangunan tersebut. Seperti:

5. Pemerintah Pusat, bertujuan sebagai sektor pendukung. Baik secara moral dan materil.
6. Instansi terkait, bertujuan sebagai pendukung dalam pengembangan pembangunan sektor pariwisata. Seperti: Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bidang Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi lain yang berkaitan dalam kepariwisataan
7. Perusahaan Swasta, bertujuan sebagai pendukung materil dan sarana. Seperti: hotel, restoran dan *cafe*, *travel agent*, *tour operator*, *tourist transportation*, *accomodation*, *souvenir shops*, dan fasilitas rekreasi
8. Masyarakat, hubungan masyarakat sangatlah penting dalam mengembangkan pembangunan pariwisata. Dikarenakan masyarakatlah yang sangat dekat dengan obyek dan dalam ruang lingkup obyek.

Diharapkan peran pemerintah dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa ruang lingkup mereka dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan kabupaten dan masyarakat itu sendiri.

Dalam mencapai pembangunan yang maksimal, pemerintah kabupaten harus melihat kebutuhan (permintaan) dari pada wisatawan. Jika obyek wisata yang dituju memerlukan perjalanan yang panjang, pemerintah kabupaten sebaiknya mempersiapkan fasilitas sarana *tourism transportation* sebagai fasilitas bantu wisatawan menuju obyek wisata. Atau dapat menggunakan fasilitas sarana *travel agent*, jika obyek wisata yang akan dituju wisatawan lebih dari satu (1) lokasi. Dan kelengkapan sarana pokok, pelengkap, dan penunjang kepariwisataan sebagai prioritas dalam mengembangkan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Humbang Hasundutan. Karena, setelah peneliti mengunjungi beberapa obyek wisata di Kabupaten Humbang Hasundutan (Kecamatan Paranginan dan Kecamatan Sipinsur) fasilitas prasarana sudah cukup melengkapi. Seperti halnya: jalan raya, telekomunikasi, pembangkit tenaga listrik, dan pelabuhan danau sudah melengkapi untuk kegiatan kepariwisataan.

Permintaan dan penawaran dalam kepariwisataan merupakan suatu kegiatan yang dapat memberikan pendapatan dan keuntungan bagi pemerintah kabupaten. Hanya saja dalam mencapai tersebut, pemerintah kabupaten harus mempersiapkan penawaran dari segala bentuk permintaan wisatawan. Sehingga kebutuhan wisatawan dapat terpenuhi dan memberikan nilai kepuasan yang maksimal kepada wisatawan.

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam pembangunan sektor pariwisata masih mengalami keterlambatan. Dengan kondisi potensi yang sangat besar belum mendukung dengan sarana dan prasarana yang ada. Sehingga permintaan dan penawaran kepariwisataan masih belum terjalin. Dalam penelitian ini, peneliti melihat potensi alam di Kabupaten Humbang Hasundutan sangat berpotensi. Terlebih lagi di kawasan wisata Danau Toba. Kawasan ini memiliki potensi wisata yang lebih dari sekedar pemandangan alam. Namun, sejarah, peninggalan batu (*geoside*), mampu dijadikan sebagai nilai tambahan dalam pengetahuan, terkhususnya bagi pelajar. Sehingga mampu memberikan wawasan dan lebih mengingat kembali sejarah serta asal-usul pahlawannya.

Maka dari, pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sudah sebaiknya memprioritaskan dalam mengembangkan pembangunan pada sektor pariwisata. Terkhususnya di kawasan wisata Danau Toba. Sehingga, Kabupaten Humbang Hasundutan dapat bersaing di pasar pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2016. Sensus Kependudukan
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan. Humbang Hasundutan dalam angka 2016
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara. 2013-2018. Rencana Strategis
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara
- Dinas Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. 2017. Data Pariwisata
- Drs. H. Oka, dan A. Yoeti, MBA. 1996. *Pemasaran Pariwisata*. Bandung.
Penerbit: Angkasa Bandung.
- Domar E.D. 1947. Essays in the Theory of Economic Growth. The American Economic Review. Vol. 37. No. 1
- [Http://digilib.unila.ac.id/204/8/BAB%20III.pdf](http://digilib.unila.ac.id/204/8/BAB%20III.pdf) (teori Sugiyono (2011:61)
populasi dan sampel.
- Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Danau Toba dan sekitarnya
- Kementerian Pariwisata Indonesia. 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja
Kementerian Pariwisata
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta. Penerbit:
Erlangga
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makroekonomi*. Edisi Keenam. Jakarta. Penerbit:
Erlangga

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita
Pengelola Kawasan Wisata Danau Toba

Schmoll, G. A, 1977. *Tourism Promotion*. London: Tourism International Press.

Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ketujuh. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:
Alfabeta.

Sukirno, Sadono. 2010. *Makroekonomi*. Edisi Ketiga. Jakarta. PT. RajaGrafindo
Persada

Todaro, dan Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesebelas
Jilid 2. Jakarta. Penerbit: Erlangga

**TERIMAKASIH ATAS KERJASAMANYA
KEPADA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**



Wakil Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan
Jimmy Togu Purba, SE

**DINAS PARIWISATA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**



Kabid. Promosi dan Kabid. Pengembangan dan Pelestarian Budaya

Barthon Naibaho dan Indra Hutabarat